

Nama: Ni Wayan Vara Wulandari

NPM: 2313031017

Membuat soal 35 Pilihan Ganda

KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK

1. Dalam konteks akuntansi sektor publik, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan hubungan integral dan hierarkis ketiga elemen tersebut untuk mencapai *Value for Money* tertinggi?
 - a. Memastikan output maksimum (Efisiensi) diperoleh dengan harga input terendah (Ekonomi), yang kemudian berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan (Efektivitas).
 - b. Mencapai output yang ditetapkan (Efektivitas) dengan membandingkan *input* dengan *input value* (Ekonomi), yang kemudian meminimalkan biaya (Efisiensi).
 - c. Pemerolehan *input* dengan kualitas terbaik (Ekonomi) harus mengorbankan pencapaian *output* (Efisiensi) demi mencapai tujuan strategis (Efektivitas).
 - d. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *outcome* yang diukur dalam satuan moneter, yang merupakan prasyarat mutlak untuk Ekonomi dan Efektivitas.
 - e. Ekonomi dicapai dengan *input* terendah, Efisiensi dengan *output* maksimum, dan Efektivitas sebagai perbandingan *input* dengan *output*.
2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan konsep yang lebih luas dari *Stewardship*, di mana *Stewardship* mengacu pada pengelolaan aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Berdasarkan perbedaan ini, tuntutan akuntabilitas publik yang semakin menguat mencerminkan kebutuhan fundamental organisasi sektor publik untuk...
 - a. Mengutamakan *Value for Money* yang didasarkan pada *equality* (pemerataan) dan *equity* (keadilan) melalui sentralisasi anggaran.
 - b. Memastikan bahwa tujuan strategis *Good Governance* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) telah tercapai sebelum memberikan laporan kepada publik.
 - c. Melampaui pengelolaan yang efisien dan menambahkan kewajiban moral serta hukum untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemegang amanah.
 - d. Memfokuskan diri hanya pada *Akuntabilitas Vertikal* (kepada masyarakat) dan mengabaikan *Akuntabilitas Horizontal* (kepada lembaga pengawas).
 - e. Melakukan privatisasi secara total agar kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh mekanisme pasar uang.
3. Dampak langsung faktor Politik yang menyebabkan inefisiensi pada BUMN dan BUMD adalah melalui mekanisme...
 - a. Meningkatnya tuntutan *equity* dan *equality* yang memaksa harga jual produk diturunkan.
 - b. Timbulnya *rent seeking behavior* dan intervensi politik yang mengganggu manajemen yang seharusnya ekonomis dan efisien.
 - c. Melemahnya *Akuntabilitas Program* yang disebabkan oleh pergeseran budaya birokrasi yang sentralistik.

- d. Kebutuhan untuk memenuhi *Akuntabilitas Hukum* melalui privatisasi aset-aset strategis.
 - e. Perbandingan *input* dengan *input value* menjadi tidak relevan karena perubahan selera konsumen (faktor kultur).
4. Misi utama privatisasi adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari langkah ini dalam kerangka akuntansi sektor publik adalah...
- a. Mengubah akuntabilitas horizontal menjadi akuntabilitas vertikal.
 - b. Memastikan *social pressure* dan *regulation* tetap menjadi tekanan utama bagi BUMN/BUMD.
 - c. Mendorong *Good Governance* dengan meniadakan *rent seeking behavior*.
 - d. Agar kinerja finansial perusahaan dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang, yang dapat meningkatkan efisiensi.
 - e. Memberikan kebebasan kepada BUMN untuk mengabaikan prinsip *Value for Money* dan hanya fokus pada *equality*.
5. Manakah skenario di bawah ini yang secara spesifik menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip Equity dalam pelayanan sektor publik?
- a. Seluruh warga negara menerima kuota subsidi listrik yang sama tanpa memandang tingkat kekayaan.
 - b. Pembangunan infrastruktur hanya berfokus di satu wilayah geografis tertentu yang merupakan basis politik pemimpin.
 - c. Pelayanan publik didistribusikan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan membayar atau kebutuhan spesifik kelompok marginal.
 - d. *Output* layanan maksimum dicapai dengan *input* terendah (Efisiensi).
 - e. Pemerintah mendesentralisasikan wewenang pelayanan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan Efektivitas.

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

6. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dan pengendalian organisasi (*organizational control*). Suatu badan publik berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu dan dalam batas anggaran, tetapi tidak mencapai sasaran peningkatan kualitas layanan yang telah ditetapkan. Situasi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian keuangan, namun kegagalan dalam...
- a. *Stewardship*.
 - b. Pengendalian Organisasi.
 - c. Penganggaran.
 - d. Akuntabilitas Kejujuran.
 - e. Perencanaan Strategik.
7. Meskipun akuntansi manajemen dalam kedua sektor (publik dan swasta) bertujuan pada perencanaan dan pengendalian, fokus utama mereka berbeda. Jika sektor swasta cenderung berfokus pada maksimasi laba, sektor publik lebih berfokus pada...
- a. Perlindungan aset dan *disclosure* kepada pemegang saham.

- b. Pengoptimalan penggunaan modal.
 - c. Pencapaian *Value for Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) dan Akuntabilitas.
 - d. Penilaian investasi dan *charging for services*.
 - e. Pengendalian *overhead cost* jangka pendek.
8. Manajerial Informasi akuntansi manajemen dapat berupa kuantitatif (angka) atau kualitatif (deskripsi). Dalam penilaian investasi (salah satu peran akuntansi manajemen), manakah contoh penggunaan informasi kualitatif yang paling tepat digunakan untuk mendukung keputusan manajerial?
- a. Tingkat pengembalian investasi (IRR) proyek.
 - b. Nilai Sekarang Bersih (NPV) dari arus kas.
 - c. Biaya modal tertimbang rata-rata (WACC).
 - d. Analisis risiko politik dan kepuasan masyarakat terhadap proyek yang diusulkan.
 - e. Payback period proyek.
9. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Perbedaan mendasar yang paling memengaruhi fleksibilitas manajer dalam pengambilan keputusan adalah...
- a. Akuntansi keuangan fokus pada *disclosure*, sementara akuntansi manajemen fokus pada *internal users*.
 - b. Akuntansi keuangan hanya menyajikan informasi *historis*, sementara akuntansi manajemen menyajikan *historis dan prospektif*.
 - c. Akuntansi manajemen tidak wajib mematuhi *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, sementara akuntansi keuangan wajib, sehingga informasi manajemen lebih bebas dan relevan untuk tujuan tertentu.
 - d. Akuntansi manajemen berfokus pada *costs of services*, sementara akuntansi keuangan berfokus pada *revenue*.
 - e. Akuntansi keuangan berfokus pada perlindungan aset, sedangkan akuntansi manajemen berfokus pada *equality*.
10. Akuntansi manajemen memiliki peran utama memberikan informasi yang relevan dan handal kepada manajer. Jika informasi biaya layanan (*costs of services*) yang digunakan untuk penentuan tarif pelayanan (*charging for services*) tidak handal, konsekuensi terburuk bagi sektor publik adalah...
- a. Pengendalian keuangan menjadi terlalu ketat.
 - b. Terjadinya inefisiensi ekonomi karena penetapan tarif terlalu rendah (subsidi berlebihan) atau terlalu tinggi (mengurangi akses publik).
 - c. Perencanaan strategik menjadi tidak relevan.
 - d. Informasi yang disampaikan menjadi lebih banyak bersifat *ad hoc* daripada rutin.
 - e. *Financial control* melemah tetapi *organizational control* menguat.

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

11. Pengendalian manajemen mencakup serangkaian fungsi, termasuk perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja.

Fungsi manakah dari daftar tersebut yang secara *krusial* memerlukan hasil dari penilaian kinerja sebagai *input* utama untuk perbaikan berkelanjutan?

- a. Koordinasi dan Komunikasi Informasi.
- b. Perencanaan dan Penganggaran.
- c. Pengambilan Keputusan dan Motivasi.
- d. Motivasi dan Pengambilan Keputusan.
- e. Perencanaan dan Pengendalian (untuk siklus berikutnya). (Penilaian kinerja menyediakan umpan balik untuk siklus perencanaan dan pengendalian selanjutnya).

12. Tipe pengendalian manajemen dibagi menjadi Pengendalian Preventif, Pengendalian Operasional, dan Pengendalian Kinerja. Jika sebuah kementerian sedang menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan melakukan pelatihan staf sebelum meluncurkan program baru, tipe pengendalian yang sedang diterapkan oleh kementerian tersebut adalah...

- a. Pengendalian Kinerja, karena bertujuan mengukur efektivitas *outcome*.
- b. Pengendalian hanya melalui sistem pelaporan dan *feedback*.
- c. Pengendalian Kinerja dan Pengendalian Operasional secara simultan.
- d. Pengendalian Preventif, karena bertujuan mencegah masalah sebelum kegiatan operasional dimulai.
- e. Pengendalian Operasional, karena berfokus pada kegiatan harian yang sedang berlangsung.

13. Tujuan utama pengendalian manajemen adalah menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Manakah dari tipe pengendalian di bawah ini yang paling secara langsung bertanggung jawab untuk memastikan aspek efektivitas (pencapaian tujuan) dari strategi yang dijalankan?

- a. Pengendalian Preventif, karena menetapkan standar awal.
- b. Pengendalian Operasional, karena mengawasi alur kerja harian.
- c. Pengendalian Kinerja, karena ia mengukur hasil (kinerja) terhadap tujuan strategis yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian Keuangan, karena mengontrol kepatuhan anggaran.
- e. Pengendalian Motivasi, karena berfokus pada moral staf.

14. Sistem pengendalian manajemen memfasilitasi pengambilan keputusan. Tahap manakah dalam sistem pengendalian manajemen yang paling banyak menyajikan informasi analitis (laporan, perbandingan *actual* vs *budget*) yang menjadi dasar utama bagi manajer untuk mengambil keputusan korektif?

- a. Penilaian Kinerja
- b. Pengendalian.
- c. Motivasi.
- d. Koordinasi
- e. Perencanaan.

15. Pengendalian manajemen bertujuan untuk menjamin strategi terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam sistem ini, manakah yang merupakan elemen pengendalian yang paling fokus pada Efisiensi (memperoleh *output* maksimal dengan *input* tertentu)?

- a. Perencanaan Tujuan, karena menetapkan *outcome*.
- b. Motivasi, karena meningkatkan kinerja staf.

- c. Pengendalian Operasional, karena secara langsung mengawasi alur kerja dan penggunaan sumber daya harian.
- d. Penilaian Kinerja, karena mengukur *outcome* strategis.
- e. Komunikasi Informasi, karena memastikan data yang relevan sampai.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

16. Dalam Tahap Persiapan Anggaran, pemerintah daerah wajib membuat dokumen perencanaan daerah. Peran strategis dokumen ini dalam konteks siklus anggaran daerah adalah...
 - a. Sebagai landasan formal yang mengikat dan rasional bagi taksiran pengeluaran yang diusulkan dan disajikan kepada DPRD.
 - b. Untuk membatasi tanggung jawab manajer keuangan publik pada tahap implementasi.
 - c. Sebagai alat jaminan dan pertanggungjawaban utama kepada masyarakat.
 - d. Untuk menggantikan *bottom-up planning* dalam penentuan APBD.
 - e. Sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan secara merata.
17. Perbedaan mendasar antara Anggaran Publik dan Anggaran Swasta terletak pada kriteria pertimbangan di mana anggaran publik harus merefleksi perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Implikasi utama dari kriteria ini terhadap proses penganggaran adalah...
 - a. Anggaran sektor publik harus selalu didasarkan pada perhitungan laba (profit) bersih.
 - b. Anggaran sektor publik harus selalu didasarkan pada *zero-based budgeting*.
 - c. Proses penganggaran sektor publik bersifat sangat politis dan rentan terhadap tekanan sosial-politik untuk mengubah alokasi sumber daya.
 - d. Anggaran sektor publik tidak memerlukan pengawasan oleh lembaga khusus.
 - e. Anggaran sektor publik hanya berfokus pada pengeluaran, bukan penerimaan.
18. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran memiliki keterkaitan utama dengan aspek akuntabilitas. Mengapa keterkaitan ini penting secara *strategis* dalam siklus anggaran?
 - a. Karena pada tahap inilah anggaran menjadi alat kebijakan fiskal.
 - b. Karena tahap ini berfungsi sebagai *feedback* formal, menunjukkan sejauh mana eksekutif telah memenuhi jaminan dan pertanggungjawaban kepada legislatif/masyarakat.
 - c. Karena menjamin *bottom-up planning* akan selalu terlaksana di tahun berikutnya.
 - d. Karena tahap ini menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen secara rinci.
 - e. Karena tahap ini menetapkan *tujuan dan target* yang hendak dicapai.
19. Pada Tahap Pelaksanaan Anggaran, peran utama manajer keuangan publik adalah...
 - a. Melakukan pelaporan dan evaluasi anggaran (*Tahap Pelaporan*).
 - b. Menetapkan arah dan tujuan kebijakan umum APBD bersama DPR/DPRD.
 - c. Memberikan argumentasi rasional kepada legislatif (*Tahap Ratifikasi*).
 - d. Bertanggung jawab menciptakan sistem informasi akuntansi dan pengendalian anggaran yang telah disepakati.
 - e. Mempersiapkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan (*Tahap Persiapan*).

20. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menjelaskan bagaimana anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan Stabilisasi Ekonomi?
- a. Anggaran digunakan untuk membatasi pengeluaran agar sesuai dengan taksiran pendapatan.
 - b. Pemerintah menggunakan surplus atau defisit anggaran yang terencana untuk memengaruhi permintaan agregat dan menstabilkan siklus bisnis.
 - c. Anggaran dipakai untuk menjamin bahwa dana dialokasikan secara adil (Redistribusi).
 - d. Anggaran harus mendapat jaminan dan pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD.
 - e. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh departemen pemerintah.

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

21. Salah satu masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS adalah masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan, dan perubahan politik/ekonomi. Implikasi utama ketidakpastian ini adalah...
- a. Memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.
 - b. Anggaran menjadi bersifat kaku dan sentralis.
 - c. Membuat analisis *statistically oriented* dan *cost-benefit analysis* sulit dilakukan dan kurang relevan.
 - d. Mendorong *incrementalism* dan *line-item* secara bersamaan
 - e. Menjamin semua *item* pengeluaran diperiksa kelayakannya.
22. Anggaran Tradisional dicirikan oleh Line-Item dan Spesifikasi. Manakah dari pasangan ciri ini yang memiliki implikasi utama terhadap kekakuan penganggaran?
- a. Line-Item (fokus pada jenis pengeluaran, bukan tujuan) dan Spesifikasi (alokasi dana yang terinci pada setiap pos).
 - b. Line-Item (menyebabkan pengeluaran besar tidak diteliti) dan Sentralis (persetujuan lambat).
 - c. Tahunan (aliran informasi tidak memadai) dan Incrementalism (mengabaikan realitas politik).
 - d. Anggaran Bruto (tidak mencakup semua biaya) dan *Overlapping* (tumpang tindih).
 - e. Incrementalism (tidak ada kajian mendalam) dan *Bottom-up Planning* (kurangnya data).
23. Kedua teknik anggaran modern (ZBB dan PPBS) menghadapi masalah utama yang serupa dalam implementasinya, yaitu hambatan birokrasi dan perlawanan politik. Perlawanan politik ini paling sering muncul karena...
- a. Manajer tidak memiliki kapabilitas tinggi untuk mengimplementasikan *statistically oriented* budgeting.
 - b. Sulitnya menentukan *opportunity cost* secara tepat.
 - c. Teknik ini lebih berorientasi pada *input* daripada *output*.
 - d. Teknik ini memaksa perubahan program secara drastis dan menantang *status quo* serta kepentingan yang sudah mapan.
 - e. Tidak ada *line-item* yang memuat *item* pengeluaran yang tidak relevan lagi.
24. Salah satu kelemahan kritis PPBS yang membuatnya sulit diimplementasikan di lingkungan sektor publik adalah...

- a. Memudahkan pendelegasian tanggung jawab ke manajemen menengah
 - b. Fokus utamanya hanya pada *input* dan *line-item* pengeluaran yang kaku.
 - c. Mengabaikan realitas politik dan organisasi, karena PPBS merupakan teknik anggaran yang secara dominan *statistically oriented*.
 - d. Keterbatasan untuk mempertimbangkan semua biaya yang akan datang.
 - e. Menghilangkan program yang *overlapping* (tumpang tindih).
25. Tradisional dan Modern Anggaran Tradisional cenderung berorientasi pada input daripada output. Sebaliknya, pendekatan anggaran modern (*New Public Management*) seperti PPBS dan ZBB bertujuan untuk...
- a. Mengaitkan secara eksplisit *input* yang digunakan dengan *output* atau *outcome* yang dihasilkan (kinerja).
 - b. Menjamin *Line-Item* pengeluaran yang kaku dan sentralis.
 - c. Memisahkan proses penganggaran antara pengeluaran rutin dan investasi.
 - d. Mendorong penggunaan *marginal utility* yang mengabaikan *realitas politik*.
 - e. Menciptakan sekat antar departemen yang kaku.

ANALISIS INVESTASI SEKTOR PUBLIK

26. Dari keempat aspek kelayakan investasi publik (Teknis, Sosial dan Budaya, Ekonomi dan Finansial, Distribusi), manakah aspek yang memiliki kekuatan veto (penolakan absolut) paling fundamental dan bersifat *preventif* dalam siklus keputusan investasi?
- a. Aspek Ekonomi dan Finansial, karena kegagalan NPV negatif secara mutlak akan membatalkan proyek.
 - b. Aspek Distribusi, karena pelanggaran keadilan sosial (equity) adalah pelanggaran etika publik tertinggi.
 - c. Aspek Sosial dan Budaya, karena implikasi sosial dapat menyebabkan penolakan politis yang menghentikan implementasi.
 - d. Aspek Teknis, karena investasi sebaiknya ditolak jika tidak layak aspek teknisnya, terlepas dari potensi manfaat ekonomi atau sosial.
 - e. Aspek Finansial, karena kegagalan *payback period* dalam batas waktu yang ditentukan.
27. Peran *Capital Rationing* Capital Rationing (keterbatasan dana) merupakan faktor yang memengaruhi keputusan investasi publik. Dalam konteks analisis investasi, peran *Capital Rationing* paling tepat digambarkan sebagai...
- a. Mekanisme yang menentukan jenis penggolongan usul investasi (penggantian/penambahan/baru).
 - b. Kondisi yang memaksa pemerintah memilih hanya proyek-proyek dengan NPV tertinggi dari sekumpulan proyek yang layak secara mandiri.
 - c. Alat yang menaikkan *tingkat diskonto* untuk mengendalikan inflasi.
 - d. Alat untuk memastikan adanya persamaan kesempatan mendapat pelayanan (Aspek Distribusi).
 - e. *Opportunity cost* untuk staf dan perlengkapan.

28. Penggolongan usul investasi dapat berupa Investasi Penggantian, Investasi Penambahan Kapasitas, atau Investasi Baru. Jika pemerintah selalu memprioritaskan usulan Investasi Penggantian, implikasi terburuk yang terjadi pada cakupan layanan adalah...
- a. Cakupan layanan akan tetap statis dan tidak akan ada tambahan cakupan layanan baru yang signifikan di masa depan.
 - b. Adanya *rent seeking behavior* dalam proses penganggaran.
 - c. Kebutuhan *tingkat utang pemerintah* akan menurun drastis.
 - d. Keputusan investasi hanya didasarkan pada *aspek teknis* semata.
 - e. Terjadi kesulitan dalam menetapkan *tingkat diskonto*.
29. Jika dalam investasi swasta, tingkat diskonto merefleksikan *required rate of return* individu, maka dalam investasi publik, tingkat diskonto harus merefleksikan...
- a. Biaya marginal jangka panjang dari penyediaan barang publik.
 - b. *Payback period* yang lebih panjang dari proyek swasta.
 - c. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (*social opportunity cost rate*) dan *social time preference rate*.
 - d. Biaya total (C) dikurangi Manfaat total (M).
 - e. Dampak inflasi terhadap Biaya Eksternal (*External Cost*).
30. Analisis Biaya-Manfaat (CBA) dan Analisis Efektivitas Biaya (CEA) digunakan untuk mengevaluasi investasi. Jika CBA bertujuan mengukur manfaat sosial bersih (*net social benefit*), maka CEA digunakan ketika...
- a. Manajer keuangan publik membutuhkan alat pengambilan keputusan yang tidak mengabaikan nilai waktu uang.
 - b. Tujuan utama investasi (*output/outcome*) dapat diukur secara kuantitatif, namun sulit untuk dinilai atau diubah ke dalam unit moneter.
 - c. Proyek investasi berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas investasi.
 - d. *Opportunity cost of capital* lebih tinggi daripada *social time preference rate*.
 - e. Proyek tersebut diklasifikasikan sebagai investasi penggantian (*replacement investment*).

PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK

31. Salah satu alasan pembebanan tarif pelayanan publik adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi. Namun, tujuan ini sering berkonflik dengan pertimbangan ekuitas (keadilan). Strategi harga yang paling efektif untuk menyeimbangkan *efisiensi* dan *ekuitas* secara simultan adalah...
- a. Memastikan *Full Cost Recovery* (berdasarkan biaya total) agar tidak membebani APBD/APBD.
 - b. Menerapkan *Two-part tariffs* (tarif dua bagian) yang hanya berdasarkan besarnya konsumsi.
 - c. Mengabaikan *Opportunity Cost of Capital* dalam perhitungan *Marginal Cost Pricing*.
 - d. Menerapkan *Peak-load tariffs* secara seragam tanpa memandang waktu konsumsi.
 - e. Menerapkan *Marginal Cost Pricing* sambil memberikan *diskriminasi harga* atau *subsidi silang* pada kelompok masyarakat miskin.

32. Dalam taksiran harga, manakah pertimbangan biaya di bawah ini yang paling penting dimasukkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa proyek pelayanan publik tersebut tidak merugikan potensi penggunaan dana di sektor lain?
- a. *Pooling* (pemerataan biaya antar individu).
 - b. *Opportunity Cost of Capital* (Biaya Kesempatan Modal).
 - c. *Cadangan Inflasi* (untuk mengantisipasi kenaikan harga).
 - d. *Semi Variable Overhead Cost* (biaya tidak tetap).
 - e. *Accounting Price* (harga yang disesuaikan dengan tujuan sosial).
33. *Accounting Price* adalah salah satu pertimbangan dalam taksiran biaya penetapan harga. Peran utama *Accounting Price* di sektor publik adalah...
- a. Menyesuaikan harga *input* (biaya) yang digunakan agar lebih merefleksikan tujuan sosial atau kondisi pasar yang terdistorsi.
 - b. Untuk menciptakan *cadangan inflasi* di masa depan.
 - c. Untuk memudahkan perhitungan *Marginal Cost Pricing* yang sulit.
 - d. Memastikan tarif yang dibebankan didasarkan pada besarnya konsumsi (*Two-part tariffs*).
 - e. Mengukur jumlah yang dikonsumsi secara tepat.
34. Barang campuran privat dan publik dicirikan sebagai barang/jasa yang dikonsumsi secara individual tetapi seluruh masyarakat membutuhkannya. Manakah karakteristik yang paling membedakannya dari Barang Privat murni?
- a. Keduanya sama-sama tidak dapat dibebankan tarif pelayanannya.
 - b. Barang privat tidak dapat diserahkan kepada sektor swasta, sedangkan barang campuran bisa.
 - c. Barang campuran tetap memiliki pembenahan tarif langsung, namun manfaatnya meluas pada seluruh masyarakat, tidak hanya individu.
 - d. Batasan antara keduanya sangat mudah untuk ditentukan.
 - e. Barang privat hanya dapat dibiayai melalui pajak.
35. Manakah strategi harga pelayanan publik yang secara mutlak bertujuan untuk mengabaikan subsidi pemerintah dan sepenuhnya membebankan biaya total kepada konsumen?
- a. *Marginal Cost Pricing*.
 - b. *Two-part tariffs*.
 - c. Harga di atas *marginal cost*.
 - d. Diskriminasi harga.
 - e. *Full Cost Recovery*